



EKSPEDISI ILMIAH ANTARTIKA KE-40 TIONGKOK DIMULAI

Tim ekspedisi ilmiah Antartika ke-40 Tiongkok berlayar pada Rabu (1/11), memulai misi selama 5 bulan. Misi ini dilakukan 3 kapal. Kapal pemecah es penelitian Xuelong dan Xuelong 2 atau Snow Dragon dan Snow Dragon 2, dan kapal kargo Tian Hui berangkat dari Zhangjiagang di Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Tim yang beranggotakan 460 orang ini akan menyelidiki dampak perubahan iklim terhadap ekosistem Antartika, serta peran Antartika dalam perubahan iklim.

WHO: Ribuan Orang di Gaza Menderita Penyakit Kronis

Lebih dari 1.000 pasien di Gaza membutuhkan dialisis ginjal untuk tetap hidup.

NEW YORK(IM) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyambut baik evakuasi pertama pasien terluca dari Jalur Gaza. Namun menekankan masih terdapat ribuan korban luka lainnya dan orang-orang dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan.

Lebih dari 1.000 pasien membutuhkan dialisis ginjal untuk tetap hidup, lebih dari 2.000 pasien membutuhkan perawatan kanker, dan 45 ribu orang dengan penyakit jantung dan lebih dari 60 ribu orang memiliki diabetes.

"Pasien-pasien yang harus mendapatkan akses terus-menerus pada layanan kes-

ehatan di dalam rumah sakit Gaza dan fasilitas kesehatan lainnya harus dilindungi dari pengeboman dan penggunaan militer," kata WHO seperti dikutip Aljazeera, Rabu (1/11).

Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan hampir 8.800 orang tewas sejak perang dengan Israel meletus. Total korbannya termasuk 3.600 anak-anak, sementara lebih dari 22 ribu orang terluka.

Sebelumnya dalam konferensi pers mengenai situasi di Gaza, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan rumah sakit-rumah sakit di Gaza termasuk rumah sakit Indonesia di kantong pemukiman tersebut akan ber-

henti beroperasi bila pasokan bahan bakar berhenti.

"Dari pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza yang menyampaikan last appeal Rabu pagi mengenai pentingnya pasokan bahan bakar untuk merawat dan menyelamatkan nyawa manusia yang dirawat di rumah sakit," kata Retno.

Dalam rilis tersebut disebutkan waktu tinggal beberapa jam sebelum generator utama dua rumah sakit, yaitu rumah sakit Al Syifa Medical Complex dan juga Rumah Sakit Indonesia, akan mengalami shut down kalau tidak ada tambahan pasokan bahan bakar.

"Nah dari informasi ini, kita kemudian melakukan komunikasi dengan teman-teman relawan Mer-C yang ada di lapangan. Dan dari komunikasi kita diperoleh informasi bahwa waktu yang

tersisa adalah kurang lebih 48 jam sejak tadi pagi, karena kita melakukan komunikasi tadi pagi, sebelum generator utama mengalami shut down," tambahny.

Ia mengatakan Indonesia terus berusaha agar bahan bakar dan air bersih dapat masuk ke Gaza selain kebutuhan bahan pokok yang diperlukan rakyat Palestina di sana.

"Dengan situasi ini, kita intensifkan komunikasi agar bahan bakar dapat segera masuk ke Gaza dengan alasan kemanusiaan. Sekali lagi dengan alasan kemanusiaan," katanya.

Sementara itu, Sebanyak 1.000 anak Palestina dari Jalur Gaza akan menerima perawatan medis di rumah sakit Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu diumumkan setelah Presiden UEA Sheikh Abdullah bin Zayed melaku-

kan pembicaraan via telepon dengan Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICRC) Mirjana Spoljaric.

Dalam laporan yang diterbitkan Kamis (2/11), kantor berita UEA, Emirates News Agency (WAM), mengungkapkan, sebanyak 1.000 anak yang akan menerima perawatan bakal didampingi keluarga mereka masing-masing. Mereka akan pulang ke Gaza setelah perawatan medis selesai dilakukan.

Dalam percakapannya, Sheikh Abdullah dan Spoljaric turut mendiskusikan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza. "Mereka membahas pentingnya memungkinkan pengiriman bantuan dan bantuan medis yang aman, tanpa hambatan, dan berkelanjutan kepada warga sipil di Gaza," tulis WAM dalam laporannya. **tom**

Korea Utara Tutup Beberapa Kedutaan Besar di Seluruh Dunia

ANKARA(IM) - Korea Utara siap untuk menutup banyak kedutaan besar termasuk di Spanyol, Hong Kong, dan beberapa negara di Afrika. Menurut laporan media dan analisis, ini jadi sebuah langkah yang dapat membuat hampir 25 persen kedubes Pyongyang ditutup di seluruh dunia.

Penutupan misi diplomatik Korea Utara baru-baru ini merupakan sebuah tanda bahwa negara yang tertutup ini sedang berjuang untuk menghasilkan uang di luar negeri karena sanksi-sanksi internasional.

Dilansir dari Yahoo News, media pemerintah Korea Utara, KCNA, mengatakan bahwa para duta besar negara tersebut melakukan kunjungan perpisahan kepada para pemimpin Angola dan Uganda minggu lalu.

Media lokal di kedua negara Afrika tersebut melaporkan penutupan kedutaan besar Korea Utara di sana.

Baik Angola maupun Uganda telah menjalin hubungan persahabatan dengan Korea Utara sejak tahun 1970-an, dengan mempertahankan kerja sama militer atau proyek pembangunan patung.

Penutupan kedutaan tersebut menjadi awal dari apa yang bisa menjadi salah satu perombakan kebijakan luar negeri terbesar di negara itu dalam beberapa dekade. Hal ini berimplikasi pada keterlibatan diplomatik, pekerjaan kemanusiaan di negara yang terisolasi itu, serta kemampuan untuk menghasilkan pendapatan ilegal.

Hal ini ditulis dengan detail oleh Chad O'Carroll, pendiri situs web yang berfokus pada Korea Utara, NK Pro. Dia juga menyebut lebih dari selusin misi mungkin akan ditutup, kemungkinan karena sanksi internasional, tren Pyongyang yang melepaskan diri

dari dunia internasional, dan kemungkinan melemahnya ekonomi Korea Utara.

Kementerian Unifikasi Seoul, yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan bahwa penarikan diri tersebut mencerminkan dampak dari sanksi internasional yang bertujuan untuk membatasi pendanaan untuk program nuklir dan rudal Korea Utara.

Mereka tampaknya menaruh diri karena bisnis mereka yang menghasilkan mata uang asing telah tersandung karena penguatan sanksi oleh komunitas internasional, sehingga sulit untuk mempertahankan kedutaan lebih lama lagi," kata kementerian itu. "Ini bisa menjadi pertanda situasi ekonomi Korea Utara yang sulit, di mana sulit untuk mempertahankan hubungan diplomatik yang minimal dengan negara-negara yang secara tradisional bersahabat," tambahny.

Korea Utara memiliki hubungan formal dengan 159 negara, tetapi memiliki 53 misi diplomatik di luar negeri, termasuk tiga konsulat dan tiga kantor perwakilan, hingga menarik diri dari Angola dan Uganda.

Korea Utara juga akan menutup kedutaan besarnya di Spanyol, dengan menanganinya di Italia yang menangani urusan di negara tetangga tersebut.

Korespondensi dengan Partai Komunis Spanyol yang ditulis di situs web partai tersebut menunjukkan bahwa kedutaan Korea Utara mengumumkan penutupan tersebut dalam sebuah surat tertanggal 26 Oktober. Kedutaan Besar Korea Utara di Madrid juga menjadi sorotan setelah anggota kelompok yang ingin menggulingkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melakukan pembobolan pada tahun 2019, di mana mereka mengikat dan menyumpal staf sebelum melarikan diri dengan komputer dan perangkat lainnya. **ans**

Direktur Kantor HAM PBB Mundur karena Tak Mampu Cegah Genosida Oleh Israel

NEW YORK(IM) - Direktur kantor hak asasi manusia PBB (OHCHR) di New York, Craig Mokhiber, telah mengundurkan diri dari jabatannya, dengan alasan kegagalan badan tersebut dalam menangani krisis Israel-Palestina dengan baik.

Alih-alih melakukan tugasnya, PBB justru "menyerah pada kekuasaan AS (Amerika Serikat)" dan menyerah pada "lobi Israel", sementara "proyek kolonial pemukiman Eropa, etno-nasionalis, di Palestina telah memasuki tahap akhir," klaim pejabat senior.

"Sekali lagi, kita melihat genosida terjadi di depan mata kita, dan Organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya," kata Mokhiber dalam suratnya kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk, yang diterbitkan pada Selasa, (31/10).

Pejabat tersebut dengan tegas menggambarkan tindakan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sebagai "genosida," dan mengakui bahwa kata tersebut "sering menjadi sasaran pelecchan politik."

"Tetapi pembantaian besar-

besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi kolonial pemukiman etnonasionalis ... tidak memberikan ruang untuk keraguan atau perdebatan," bantah Mokhiber.

"Ini adalah kasus genosida yang ada dalam buku teks. Proyek kolonial pemukiman Eropa, etno-nasionalis, di Palestina telah memasuki tahap akhir, menuju percepatan pengurangan sisa-sisa terakhir kehidupan penduduk asli Palestina di Palestina," kata Mokhiber sebagaimana dilansir RT.

Mokhiber percaya bahwa PBB dahulu memiliki "prinsip" dan "otoritas" yang berakar pada "integritas" badan tersebut, seperti pada masa apartheid di Afrika Selatan, namun hal tersebut telah hilang selama bertahun-tahun. PBB telah berulang kali gagal menghentikan genosida, kata Mokhiber, dengan menyebutkan peristiwa di Rwanda dan Bosnia, genosida terhadap Yazidi oleh ISIS, dan Rohingya di Myanmar sebagai contohnya.

"Dalam beberapa dekade terakhir, bagian-bagian penting dari PBB telah menyerah pada kekuatan Amerika Serikat dan ketakutan terhadap lobi Israel, sehingga mereka mengabaikan prinsip-prinsip ini, dan mundur dari hukum internasional itu sendiri. Kita telah kehilangan banyak hal karena pengabaian ini, termasuk kredibilitas global kita sendiri. Namun rakyat Palestinah yang menderita kerugian terbesar akibat kegagalan kami," ujarnya.

Untuk memperbaiki situasi ini, PBB harus "belajar dari sikap prinsip yang diambil di kota-kota di seluruh dunia dalam beberapa hari terakhir ketika banyak orang menentang genosida, bahkan dengan risiko pemukulan dan penangkapan," sarannya.

Selain itu, ia menyerukan kepada badan tersebut untuk membatalkan "solusi dua negara yang ilusif," dan menganjurkan pembentukan "negara tunggal, demokratis, sekuler di seluruh wilayah bersejarah Palestina," yang akan menjatuhkan "pembongkaran" Israel, seperti yang dijelaskannya. Oleh pejabat tersebut sebagai "proyek kolonial pemukiman yang sangat rasial." **gugul**



TIONGKOK SERUKAN KERJA SAMA KEAMANAN AI

Wu Zhaohui (kanan), Wakil Menteri Sains Dan Teknologi Tiongkok, berpidato pada KTT Keamanan AI di Bletchley Park, Inggris, Rabu (1/11). Tiongkok menyerukan pertukaran dan kerja sama antar negara dalam bidang keamanan kecerdasan buatan (AI) dan masalah tata kelola internasional.

PBB Desak Taliban Bebaskan Aktivist HAM Perempuan

NEW YORK(IM) - Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menuntut agar rezim Taliban Afghanistan segera membebaskan dua orang perempuan pegiat hak asasi manusia dari penahanan yang "tidak dapat dibenarkan".

Para ahli di PBB mengatakan mereka percaya Neda Parwan, yang telah ditahan sejak ia ditangkap pada 19 September, dan Zholia Parsi, yang ditahan pada 27 September, ditangkap karena menggunakan "hak fundamental mereka untuk terlibat dalam protes damai."

"Kami mendesak pihak berwenang de facto untuk juga membebaskan para pembela hak-hak perempuan dan anggota keluarga mereka tanpa penundaan lebih lanjut, karena tidak ada pembenaran untuk penahanan mereka," kata para ahli seperti dikutip Miami Herald, Rabu (1/11).

Suami Parwan dan anak laki-laki Parsi yang sudah dewasa juga ditahan. Tak satu pun dari keempat orang tersebut yang didakwa, hadir di pengadilan, atau diberi akses ke pengacara. PBB mengatakan mereka semakin khawatir tentang kesejahteraan para wanita yang berafiliasi dengan Gerakan Spontanitas Wanita dan yang digambarkan PBB sebagai "pembela hak asasi manusia."

"Pembebasan Ibu Parwan dan Ibu Parsi serta anggota keluarga mereka dari penahanan adalah hal yang mendesak. Setelah lebih dari satu bulan dalam tahanan, kami semakin khawatir dengan kesehatan fisik dan mental mereka," kata para ahli tersebut.

Para ahli PBB menekankan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai merupakan inti dari hukum hak asasi manusia internasional, dan memperingatkan bahwa hal tersebut sangat penting untuk dipertahankan. Para ahli menambahkan mengekspresikan perbedaan pendapat dan menggunakan hak yang sah bukanlah alasan untuk menahan orang.

Karena jenis kelamintnya para aktivis hak asasi manusia perempuan menempatkan mereka pada risiko yang lebih tinggi untuk dikucilkan. "Taliban tampaknya terus mengintensifkan pembatasan mereka terhadap ruang sipil, terutama melalui pembungkaman suara perempuan dan anak perempuan, sehingga menciptakan efek yang mengerikan," kata para ahli.

Kami mendesak pihak berwenang de facto untuk menunjukkan rasa hormat terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan bergerak dan berserikat termasuk hak untuk terlibat dalam protes damai, sesuai dengan kewajiban internasional Afghanistan di bawah instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara."

Pembebasan pegiat pendidikan perempuan Mortaza Behboudi dan Matiullah Wesa disambut sebagai langkah positif. Keduanya ditangkap karena menyuarakan hak-hak anak perempuan untuk bersekolah dan menyerukan kepada pemerintah yang dipimpin Taliban untuk mengakhiri pelarangan terhadap pendidikan perempuan.

Wesa dibebaskan dari penjara pada Jumat (27/10) setelah ditahan selama tujuh bulan, kata Pen Path, kelompok masyarakat sipil kesetaraan pendidikan yang ia dirikan dalam sebuah posting di X. Pengadilan Kabul memerintahkan pembebasan Behboudi setelah membebaskannya dari semua tuduhan pada 18 Oktober setelah lebih dari sembilan bulan dalam tahanan.

Pada bulan September, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan dalam sebuah pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di New York bahwa Afghanistan bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan memperingatkan bahwa hak asasi manusia di negara tersebut berada dalam "keadaan runtuh."

"Pelanggaran hak asasi manusia di negara ini bukanlah hal yang baru: konflik bersenjata selama beberapa dekade berarti bahwa Afghanistan telah mengenal kekerasan dan ketidakadilan selama sebagian besar sejarahnya," kata Turk. **ans**

RSF Adukan Kejahatan Perang Terhadap Jurnalis di Gaza ke Mahkamah Pidana Internasional

PARIS(IM) - Kelompok Reporters Without Borders (RSF) telah mengajukan pengaduan kejahatan perang kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hal itu sehubungan dengan ditargetkannya jurnalis yang melakukan peliputan di Jalur Gaza. "Para wartawan ini adalah korban serangan yang berjumlah - paling tidak - untuk kejahatan perang yang membenarkan penyelidikan oleh jaksa penuntut ICC," kata RSF dalam sebuah pernyataan, Kamis (2/11), dikutip laman Anadolu Agency.

Berkas yang diajukan RSF ke ICC merinci kasus sembilan jurnalis yang terbunuh sejak Israel melancarkan serangan udara ke Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Dalam laporannya, RSF turut menyisipkan pemaparan tentang aksi perusakan yang disengaja, baik secara total maupun parsial, terhadap lebih dari 50 outlet media di Gaza.

Menurut RSF, sebanyak 34 jurnalis telah terbunuh sejak dimulainya pertempuran antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Sebanyak 12 jurnalis di antaranya tewas ketika sedang melaksanakan tugas. Dari ke-12 jurnalis tersebut, 10 berada di Gaza, kemudian dua lainnya bertempat di Israel dan Lebanon.

"Skala, keseriusan, dan sifat berulang dari kejahatan internasional yang menargetkan jurnalis, khususnya di Gaza, menyerukan penyelidikan prioritas oleh jaksa ICC. Kami telah menyerukan ini sejak Mei 2018. Peristiwa tragis saat ini menunjukkan urgensi ekstrem dari perlunya tindakan ICC," ujar Sekretaris Jenderal RSF Christophe Deloire.

Sebelum pengaduan terbaru, RSF telah dua kali melayangkan laporan kepada jaksa ICC tentang kejahatan perang terhadap jurnalis Palestina di Gaza. Pengaduan pertama dilakukan pada Mei 2018. Kalu itu terdapat beberapa jurnalis yang tewas dan terluka ketika meliput aksi "Great March of Return" di Gaza.

Pengaduan kedua dilakukan pada Mei 2021. Ketika itu serangan udara Israel menghantam lebih dari 20 kantor media di Jalur Gaza. RSF juga mendukung pen-

gaduan oleh media Aljazeera terkait penembakan hingga tewas yang dialami jurnalisnya Shireen Abu Akleh.

Pada Desember 2022, Aljazeera mengatakan, mereka akan membawa kasus pembunuhan Shireen Abu Akleh ke ICC. Aljazeera mengatakan, mereka telah melakukan penyelidikan menyeluruh atas tewasnya Shireen dan menemukan bukti baru berdasarkan beberapa laporan saksi mata. Aljazeera juga memeriksa sejumlah rekaman video di lokasi tewasnya Shireen.

Berdasarkan temuan-temuan itu, Aljazeera menyimpulkan bahwa Shireen dan beberapa jurnalis lainnya memang jadi sasaran penembakan langsung pasukan Israel. "Klaim otoritas Israel bahwa Shireen terbunuh secara tidak sengaja dalam baku tembak sama sekali tidak berdasar," kata Aljazeera dalam sebuah pernyataan, 6 Desember 2022 lalu.

Aljazeera menjelaskan, bukti-bukti yang diajukan ke kantor kejaksaan menegaskan, tanpa keraguan, bahwa tidak ada penembakan di area tempat Shireen berada. Kecuali pasukan Israel yang memang melepaskan tembakan langsung ke arah Shireen dan sejumlah jurnalis lainnya.

"Para jurnalis berada di hadapan pasukan pendudukan Israel saat mereka berjalan sebagai kelompok perlahan-lahan di jalan dengan rompi media khas mereka, dan tidak ada orang lain di jalan," ungkapnya.

Menurut Aljazeera, temuan itu secara otomatis membantah klaim Pasukan Pertahanan Israel yang menyebut tidak ada kejahatan dilakukan sepenuhnya dalam kasus tewasnya Shireen. "Bukti menunjukkan bahwa pembunuhan yang disengaja ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menargetkan dan membungkam Aljazeera," katanya.

Selama 25 tahun berkarier sebagai jurnalis di Aljazeera, Shireen kerap menggemakan suara rakyat Palestina. Oleh sebab itu, jurnalis berkebangsaan Palestina-Amerika itu mendapat julukan "suara Palestina".

Shireen tewas tertembak saat tengah meliput operasi penggerebekan pasukan Israel di Jenin, Tepi Barat, 11 Mei 2022. Sempat terjadi perdebatan tentang siapa pelaku penembakan terhadap Shireen. **tom**